

Plurality of actors dan co-coordination sebagai pondasi inovasi GASPOL Kampung KB di Kabupaten Sleman

Noor Azizah Maharani*, Bintoro Wardiyanto, Erna Setijaningrum

Universitas Airlangga, Indonesia

Email: noor.azizah.maharani-2024@pasca.unair.ac.id*,

bintoro.wardiyanto@fisip.unair.ac.id, erna.setijaningrum@fisip.unair.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
GASPOL; Kampung KB; New Public Governance	Inovasi GASPOL (Gerakan Bersama Perangkat Daerah, Organisasi, dan Lembaga) di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kabupaten Sleman merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang kolaboratif dan berkelanjutan. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan dalam implementasi Kampung KB, seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, fragmentasi program antarinstansi, serta ketimpangan kapasitas dan peran antaraktor yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inovasi GASPOL melalui perspektif New Public Governance (NPG), dengan menekankan pada aspek pluralitas aktor, co-coordination, dan co-production dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis dokumen resmi, termasuk kebijakan daerah, laporan program, dan regulasi terkait Kampung KB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GASPOL mampu membangun jejaring kolaboratif yang melibatkan perangkat daerah, lembaga masyarakat, pemerintah kalurahan, kelompok kerja Kampung KB, serta masyarakat sebagai co-producer dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kolaborasi ini mendorong integrasi program, peningkatan efisiensi layanan, dan penguatan partisipasi masyarakat. Namun demikian, implementasi GASPOL masih menghadapi tantangan berupa potensi ketimpangan kekuasaan antaraktor, koordinasi yang kompleks, serta risiko tumpang tindih program. Penelitian ini menegaskan bahwa GASPOL merepresentasikan praktik nyata paradigma New Public Governance dan berpotensi menjadi model inovasi tata kelola kolaboratif yang dapat direplikasi di daerah lain.
Keywords	Abstract
GASPOL; KB Village; New Public Governance	<i>The GASPOL (Joint Movement of Regional Apparatus, Organizations, and Institutions) innovation in the Quality Family Village (KB) of Sleman Regency is a strategic effort by the local government in strengthening collaborative and sustainable public service governance. This innovation is motivated by various problems in the implementation of KB Villages, such as weak cross-sector coordination, fragmentation of programs between agencies, and inequality of capacity and roles between actors involved. This study aims to analyze the implementation of GASPOL innovation through the perspective of New Public Governance (NPG), with an emphasis on the aspects of plurality of actors, co-coordination, and co-production in the implementation of public services. The research method used is a qualitative approach with literature study techniques and analysis of official documents, including regional policies, program reports, and regulations related to KB Villages. The results of the study show</i>

that GASPOL is able to build a collaborative network involving regional apparatus, community institutions, village governments, KB Village working groups, and the community as co-producers in the planning and implementation of the program. This collaboration encourages program integration, improved service efficiency, and strengthens community participation. However, the implementation of GASPOL still faces challenges in the form of potential power imbalances between actors, complex coordination, and the risk of program overlap. This study confirms that GASPOL represents the real practice of the New Public Governance paradigm and has the potential to become a model of collaborative governance innovation that can be replicated in other regions.



PENDAHULUAN

Pemerintah terus memprioritaskan upaya peningkatan kualitas keluarga sebagai landasan pembangunan manusia, khususnya melalui kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang tertulis dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 (Endah & Kholiq, 2019; Widya, 2024). Kampung KB merupakan wilayah di tingkat desa atau kecamatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyatukan pelaksanaan pemberdayaan serta memperkuat kelembagaan keluarga dalam segala dimensinya. Inovasi GASPOL di Kampung KB (Gerakan Bersama Perangkat Daerah, Organisasi, dan Lembaga di Kampung Keluarga Berkualitas) merupakan perwujudan respons Kabupaten Sleman terhadap instruksi tersebut. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman, integrasi dan konvergensi dari berbagai pihak yang terlibat akan menciptakan ekosistem layanan tunggal yang berfokus pada pembangunan masyarakat berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, serta pemberdayaan dan penguatan lembaga keluarga (BKKBN, 2025).

Inovasi GASPOL di Kampung KB dirancang untuk mengatasi tantangan yang muncul selama implementasi kebijakan Kampung KB. Kurangnya koordinasi, kolaborasi, kapasitas, dan kompetensi dari SDM yang terlibat menjadi hambatan dari keberjalanan serta keberlanjutan kebijakan Kampung KB (Emerson & Nabatchi, 2015). Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi terpisah tanpa ada koordinasi efektif antara berbagai pihak yang terlibat, selain itu karena kepentingan aktor yang berbeda dari berbagai sektor (Bryson et al., 2015). Untuk mengatasi permasalahan sekaligus tantangan yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Sleman membutuhkan tata kelola yang mampu mengakomodasi peran berbagai aktor yang terlibat untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, memaksimalkan kapasitas sekaligus kompetensi terkait penyelenggaraan kebijakan Kampung KB, serta memastikan keberlanjutan dampak yang dihasilkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM serta memberdayakan dan memperkuat kelembagaan keluarga, aksi perubahan inovasi GASPOL di Kampung KB berupaya untuk meningkatkan partisipasi instansi pemerintah daerah, organisasi, dan lembaga lokal. Seperti yang tertulis dalam Buku Petunjuk Teknis GASPOL di Kampung KB (Wiharyanti, 2023), alur perubahan diawali dengan tahap persiapan berupa pembentukan tim efektif untuk implementasi tindakan perubahan jangka pendek. Selanjutnya rapat koordinasi dengan 34 kelompok kerja (pokja) untuk mengidentifikasi kebutuhan pendampingan kegiatan di desa KB. Setelah mendapatkan kebutuhan yang harus dipenuhi, dilakukan rapat koordinasi untuk membangun

komitmen lintas aktor. Langkah terakhir adalah penerbitan Peraturan Bupati Nomor 40.1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kambung KB, mengamanatkan 20 perangkat daerah, organsiasi, dan lembaga serta kapanewon dan kalurahan untuk terlibat sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan dan pengembangan Kambung KB di Kabupaten Sleman.

Kalurahan Wedomartani menjadi contoh menarik dalam penerapan inovasi ini. Kalurahan Wedomartani berada di kawasan wisata, padat penduduk, dan perbatasan perkotaan yang berpotensi terjadi kerawanan dalam berbagai aspek sosial (BKKBN, 2025). Sejak ditetapkan sebagai Kampung KB, Wedomartani menunjukkan dinamika tata kelola yang melibatkan banyak aktor di tingkat lokal selaras dengan pendekatan New Public Governance (NPG). Data Kampung KB Wedomartani memperlihatkan adanya pluralitas aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan program, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kalurahan, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana)/PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), hingga kelompok-kelompok kegiatan masyarakat seperti BKB (bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor), dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja).

Keberagaman aktor ini memperkuat pandangan Osborne (2010) tentang plural state, yakni kondisi ketika layanan publik dihasilkan melalui keterlibatan banyak aktor yang saling bergantung (Nabatchi et al., 2017; Torfing et al., 2019). Selain itu, mekanisme koordinasi rutin, integrasi program lintas sektor, peran pokja Kampung KB, dan penggunaan Rumah Dataku mencerminkan adanya inter-organizational relationships yang menjadi pondasi tata kelola jaringan dalam NPG. Dengan demikian, implementasi GASPOL di Wedomartani memberikan konteks empiris yang kuat untuk menganalisis bagaimana inovasi layanan publik bekerja melalui jejaring multiaktor dan hubungan antarorganisasi (Loeffler & Bovaird, 2016; Klijn & Koppenjan, 2016; Sørensen & Torfing, 2021).

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi inovasi GASPOL di Kampung KB melalui kacamata NPG, khususnya dalam menelaah bagaimana tata kelola jaringan dan mekanisme kolaborasi antar aktor dari berbagai sektor dapat memperkuat penciptaan nilai publik (Osborne, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci, yaitu 1) bagaimana inovasi GASPOL di Kampung KB mengadopsi prinsip NPG? serta 2) bagaimana peran masing-masing aktor dalam inovasi ini? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terkait pengembangan tata kelola publik berbasis kolaborasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi Kabupaten Sleman, tetapi juga bagi daerah lain yang ingin menerapkan inovasi serupa untuk mendukung terlaksananya Inpres Nomor 3 Tahun 2022. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan inovasi pelayanan publik yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membangun dan memahami fenomena sosial yang terjadi secara lebih mendalam Neuman (2014). Metode ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi GASPOL di Kampung KB (Gerakan Bersama Perangkat Daerah, Organisasi, dan Lembaga di Kampung Keluarga Berkualitas) dengan perspektif New Public Governance (NPG). Penelitian ini menggali peran

aktor dari berbagai sektor dalam inovasi ini serta bagaimana integrasi aktor ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang menjadi prinsip utama dalam NPG (Osborne, 2010). Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu studi pustaka melalui tinjauan berbagai literatur, dokumen resmi, dan laporan terkait inovasi. Data yang diperoleh dari studi pustaka dan observasi, kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi GASPOL di Kampung KB dalam pelayanan publik serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip NPG (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GASPOL di Kampung KB

Gerakan Bersama Perangkat Daerah, Organisasi, dan Lembaga di Kampung Keluarga Berkualitas (GASPOL di Kampung KB) merupakan inovasi yang dibentuk untuk mengakomodasi penyelenggaraan Kampung KB di Kabupaten Sleman secara terkoordinasi dan konvergen. Inovasi ini diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 40.1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, sehingga seluruh aktor yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi ini berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari inovasi ini (Wiharyanti, 2023) di antaranya:

1. Tujuan jangka pendek

Upaya membangun persepsi dan komitmen di internal Dinas P3AP2KB dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung KB di Kabupaten Sleman melalui GASPOL menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran program. Hal ini mencakup peninjauan ulang kebutuhan pendampingan kegiatan dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB, serta meninjau kembali keterlibatan perangkat daerah, organisasi, dan lembaga terkait dalam pelaksanaannya. Selain itu, penyusunan dokumen Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kampung KB juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kerangka hukum yang jelas untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

2. Tujuan jangka menengah

Implementasi Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kampung KB dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi GASPOL di Kampung KB merupakan langkah kunci dalam memastikan keberhasilan program ini. Dengan terlakukannya peraturan tersebut, diharapkan kegiatan Kampung KB dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, sementara proses monitoring dan evaluasi yang terus-menerus dilakukan dapat mengukur efektivitas program serta memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehingga keberlanjutan dan perbaikan program dapat dilakukan secara berkelanjutan.

3. Tujuan jangka panjang

Penyelenggaraan Kampung KB dioptimalkan melalui langkah-langkah terkoordinasi dan terintegrasi, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah, organisasi, dan lembaga. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan dan memperkuat institusi keluarga serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB di setiap desa/kelurahan. Hal ini dilakukan dengan penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku keluarga, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga, serta penataan lingkungan keluarga. Selain itu,

pengembangan dan evaluasi berkesinambungan terhadap program GASPOL di Kampung KB juga menjadi bagian penting dari strategi ini untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

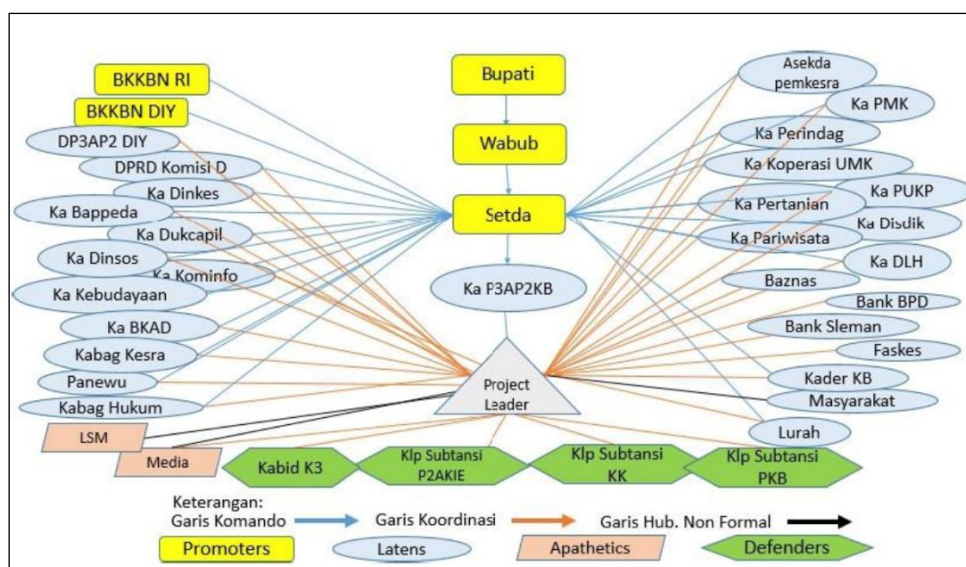
B. Bagaimana inovasi GASPOL mengadopsi prinsip NPG?

Implementasi inovasi GASPOL di Kampung KB menjadi salah satu implementasi dari prinsip-prinsip NPG yang diterapkan dalam berbagai sektor tata kelola lokal. GASPOL, yang dibentuk untuk menyinergikan berbagai perangkat daerah, lembaga masyarakat, dan struktur pendukung di lapangan, menunjukkan karakteristik yang konsisten dengan dua prinsip inti NPG yaitu *plurality of actors* dan *inter-organizational relationships* (Osborne, 2010). Dua prinsip ini menggambarkan situasi di mana layanan publik dihasilkan oleh banyak aktor yang saling bergantung dan banyak proses yang membentuk kebijakan publik, *plural state* dan *pluralist state* (Osborne, 2010).

1. Prinsip *plurality of actors*

Prinsip ini mengakui bahwa entitas yang berbeda di luar struktur pemerintahan berbagi kemampuan, legitimasi, dan sumber daya untuk mengatasi isu-isu publik. Dalam prinsip ini, ditekankan bahwa integrasi berbagai aktor sangat penting untuk efektivitas tata kelola modern. Aktor-aktor ini meliputi unit pemerintah seperti perangkat daerah, kemudian organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta. Keterlibatan berbagai aktor tersebut membawa keunikan, keahlian, dan sumber daya yang berbeda. Jaringan tata kelola yang pluralistik secara langsung tergambar dalam implementasi inovasi GASPOL di Kampung KB. Aktor yang terlibat dapat berbagi risiko dan mengoordinasikan kegiatan secara non-hierarkis.

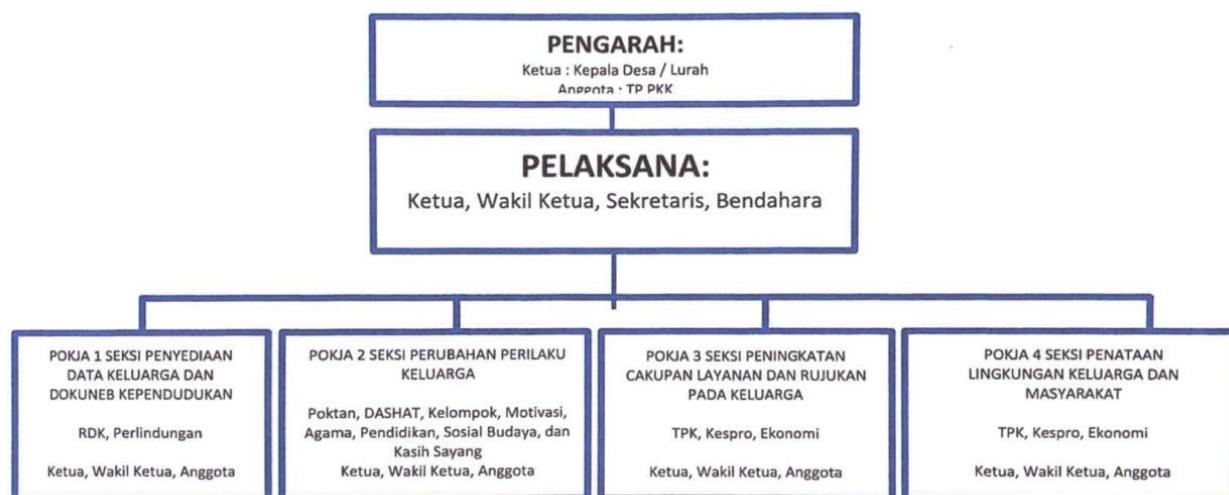
Seperti yang tertulis dalam Buku Petunjuk Teknis GASPOL di Kampung KB (Wiharyanti, 2023), semua stakeholder yang terlibat diminta memberikan dukungan sesuai tugas pokok, fungsi, peran, dan otoritas masing-masing (Osborne, 2010). Kampung KB bukan sebuah program tunggal, melainkan bersifat multidimensi yang melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, ketahanan keluarga, dan pemberdayaan perempuan.



Gambar 1. Stakeholder yang terlibat dalam inovasi GASPOL di Kampung KB

Pada gambar di atas, terlihat bahwa Bupati Sleman menjadi puncak aktor yang bertugas sebagai pengawas. Kemudian, wakil bupati sebagai perantara antara bupati dan sekretaris daerah. Sekretaris daerah memiliki tugas untuk memberikan komando pada DPRD, kepala dinas, sektor perbankan, sampai kepala desa mengenai pelaksanaan inovasi ini. Tentunya Kepala Dinas P3AP2KB bertanggung jawab penuh atas inovasi ini karena yang diberikan mandat adalah Dinas P3AP2KB.

Tidak hanya melibatkan peran perangkat daerah, inovasi ini juga mengajak unit terkecil, masyarakat, untuk terlibat langsung dalam menciptakan keberhasilan GASPOL di Kampung KB. Berdasarkan SK Bupati Sleman Nomo 41.1 Tahun 2023 tentang Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Sleman, masing-masing kapanewon dan kalurahan menetapkan keputusan lurah tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di kalurahan terkait. Salah satu contohnya adalah Keputusan Lurah Tamanmartani Nomor 4.a/Kep/Lur/2024 tentang Pembentukan Keluarga Berkualitas Di Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman (2024).



Gambar 2. Struktur kelompok kerja di tingkat kalurahan

Dengan arahan dari lurah, kelompok kerja (pokja) dibentuk untuk mewujudkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui 1) pendekatan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga; 2) penguatan delapan fungsi keluarga; serta 3) partisipasi aktif masyarakat dan pembangunan yang terintegrasi lintas sektor.

Melalui peta stakeholder dan struktur pokja tersebut, prinsip pluralitas aktor dalam inovasi ini didesain dengan sengaja. Perangkat daerah, organisasi, dan lembaga yang terlibat menunjukkan keadaan layanan publik yang tidak bisa dikerjakan secara tunggal, melainkan membutuhkan peran aktor lain untuk menyuksekkannya (multiple interpedendent actors) (Osborne, 2010). Sedangkan, struktur pokja mejadi wadah formal untuk mempertemukan kelompok dan sumber daya lokal agar dapat mendukung pelaksanaan GASPOL di level masyarakat. Maka dari itu, inovasi GASPOL di Kampung KB beroperasi dalam konteks multiaktor yang tertulis di dalam prinsip pluralitas (Osborne, 2010).

2. Prinsip inter-organizational relationships

Jika *plurality of actors* menjelaskan “siapa saja” yang terlibat, maka *inter-organizational relationships* menjelaskan “bagaimana mereka bekerja bersama”. Prinsip ini merupakan inti dari NPG karena fokus tata kelola modern ada pada *inter-organizational relationships* atau biasa disebut *co-coordination* (Osborne, 2010). Inovasi GASPOL di Kampung KB berawal dari kurangnya koordinasi dan terjadi fragmentasi kegiatan di antara berbagai aktor yang terlibat. Maka dari itu, Dinas P3AP2KB membuat mekanisme yang efektif untuk menyelaraskan kerja berbagai aktor dalam jejaring (Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, 2024).

Dalam konteks NPG, *co-coordination* merupakan sebuah proses yang memastikan bahwa kegiatan dan sumber daya dari berbagai aktor yang terlibat berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan yang sama. *Co-coordination* tersebut tercermin pada pembentukan mekanisme standard operasional yang jelas, struktur pokja yang terintegrasi, dan penyelarasan kegiatan (Wiharyanti, 2023). Integrasi aktor ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang menjadi prinsip utama dalam NPG (Osborne, 2010).

Standard Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan GASPOL di Kampung KB menunjukkan interaksi berlapis dari pokja Kampung KB hingga Bupati Sleman. Dalam SOP memuat proses seperti koordinasi jadwal pertemuan antar aktor, penyampaian peta sasaran dan rencana pelaksanaan, analisis data kebutuhan keluarga, perumusan prioritas masalah, kesepakatan tindak lanjut lintas instansi, pengajuan rencana kegiatan oleh tiap perangkat daerah, pengumpulan data inventaris kebutuhan, serta koordinasi lanjutan dengan stakeholder.

Tabel 1. Kegiatan Pokja Kampung KB

Tabel Kegiatan Pokja Kampung KB			
Program Bangga Kencana - Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB			
No	Kegiatan	Pelaksana	Output
1	Mengoordinasikan jadwal pertemuan Pokja	Pokja Kampung KB	Jadwal pertemuan
2	Pelaksanaan pertemuan Pokja	Pokja Kampung KB	Jadwal pertemuan
3	Menyampaikan peta sasaran dan rencana pelaksanaan program Bangga Kencana	Pokja Kampung KB	Rencana pembahasan
4	Menyampaikan data/isu/hasil pengamatan yang terkait dengan tupoksi masing-masing seksi atau isu lain yang penting dan menjadi perhatian masyarakat	Pokja Kampung KB	Data kebutuhan Kampung KB
5	Merumuskan prioritas masalah program Bangga Kencana di Kampung KB	Pokja Kampung KB	Data kegiatan prioritas
6	Menyepakati prioritas masalah yang harus ditindaklanjuti	Pokja Kampung KB	Data kegiatan prioritas
7	Mengisi link pelaporan inventaris kebutuhan pokja untuk menyelesaikan prioritas masalah di kampung KB	Pokja Kampung KB	Data inventaris kebutuhan Kampung KB
8	Mengajukan rencana kegiatan yang akan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah	Pokja Kampung KB	Data inventaris kebutuhan Kampung KB
9	Mengoordinasikan dengan stakeholder	Penyuluh KB Kapanewon	Data inventaris kebutuhan Kampung KB
10	Menginformasikan waktu pelaksanaan pertemuan Pokja bersama stakeholder kepada PLKB / Pokja Kampung KB	Penyuluh KB Kapanewon	Jadwal pertemuan

11	Pertemuan Pokja bersama stakeholder	Pokja Kampung KBStakeholder	Rencana kerja masyarakat Kampung KB
12	Mengintegrasikan kegiatan masing-masing Poktan ke dalam kegiatan per seksi	Pokja Kampung KB	Catatan kegiatan Kampung KB
13	Mencatat setiap kegiatan yang dilakukan menurut seksi	Pokja Kampung KB	Catatan kegiatan Kampung KB
14	Melaporkan kegiatan di dalam website Kampung KB	Pokja Kampung KB	Data laporan
15	Melakukan monitoring dan evaluasi multisektor pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB	Tim Kerja Dalduk dan Advo KIE	Hasil evaluasi
16	Membuat laporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB untuk disetujui oleh Kepala Dinas P3AP2KB Sleman	Kepala Bidang P2KB	Hasil evaluasi
17	Kepala Dinas P3AP2KB menyampaikan laporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB kepada Bupati Sleman	Kepala Dinas	Laporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB
18	Laporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB diterima oleh Bupati Sleman	Bupati	Laporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB

SOP ini juga menunjukkan alur koordinasi serta hubungan lintas lembaga yang terlibat dalam setiap keputusan dan implementasi GASPOL di Kampung KB yang terstruktur, saling bergantung, dan berkelanjutan. Terdapat dua jenis koordinasi, yaitu horizontal (kabupaten, kapanewon, kalurahan) dan vertikal (antar perangkat daerah). Alur kerja dan koordinasi ini sejalan dengan pendapat Osborne (2010) bahwa hubungan yang didasarkan pada koordinasi, berbagi informasi, dan prosedur bersama akan lebih baik dan bermanfaat daripada yang diciptakan oleh satu aktor saja.

C. Bagaimana peran masing-masing aktor dalam inovasi ini?

Aktor publik, sosial, dan komunitas memainkan peran yang saling bergantung dalam pengembangan dan penyediaan layanan publik dalam kerangka NPG (Osborne, 2010). Penerapan inovasi GASPOL di Kampung KB Kabupaten Sleman secara eksplisit menegaskan prinsip dari NPG, yaitu plurality of actors dan inter-organizational relationships. Berbagai sumber daya dan kewenangan yang diintegrasikan dari berbagai aktor, inovasi GASPOL berupaya mengoptimalkan pelaksanaan Kampung KB melalui struktur kolaboratifnya. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 40.1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, yang menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan inovasi GASPOL.

1. Pemerintah Kabupaten sebagai Koordinator Utama

Pemerintah Kabupaten Sleman, melalui bupati, berperan sebagai pengarah dan koordinator utama (Pasal 2–3). Bupati menetapkan kebijakan strategis, mengoordinasikan perangkat daerah, dan memastikan integrasi lintas sektor dalam pembangunan keluarga. Peraturan ini menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib berpartisipasi secara terintegrasi dan konvergen sesuai dengan tugas dan kewenangannya (Pasal 7 ayat 2). Peran koordinatif bupati dan sekretariat daerah dalam GASPOL menunjukkan pergeseran peran

pemerintah yang selaras dengan konsep NPG, dari command and control menjadi collaborative orchestration (Osborne, 2010).

2. Dinas P3AP2KB sebagai Sektor Utama

Berdasarkan Pasal 15 dan Lampiran Perbup 40.1/2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menjadi instansi pengampu utama. Dinas ini memimpin koordinasi antar perangkat daerah dan menjadi penghubung langsung dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Melalui program Rumah Dataku, BKB, BKR, dan BKL, Dinas P3AP2KB berperan dalam perubahan perilaku keluarga dan peningkatan layanan dasar berbasis keluarga. Dinas ini juga bertugas untuk advokasi, bimbingan teknis, serta supervisi implementasi Kampung KB di tingkat Kalurahan.

3. Perangkat Daerah lain sebagai Co-Implementer

Perbup tersebut mencantumkan 14 dinas teknis yang berperan langsung dalam penyelenggaraan Kampung KB, antara lain: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melaksanakan program penyediaan data dan dokumen kependudukan; Dinas Kesehatan yang menjalankan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISP), Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta edukasi kesehatan untuk ibu hamil, balita, remaja, dan lansia; Dinas Kebudayaan yang melakukan pendampingan dan sosialisasi adat seni dan budaya; Dinas PMK yang melaksanakan program posyandu; Dinas Sosial yang memperkuat perlindungan sosial melalui program Puskesmas SLRT, P2K2, serta pemberian bantuan kesehatan untuk keluarga miskin; Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyediakan sarana dan prasarana olahraga; Dinas Pendidikan yang melaksanakan PAUD, pendidikan dasar dan menengah, serta memberikan bantuan pendidikan untuk anak sekolah dari keluarga miskin; Dinas Koperasi dan UKM yang mengembangkan UMKM, serta promosi dan pemasaran koperasi dan UMKM; Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan yang memfasilitasi kelompok tani dan memberikan bantuan benih serta pendampingan izin pangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melakukan bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi keluarga; Dinas Pariwisata yang mengembangkan desa wisata di Kampung KB; Dinas Komunikasi dan Informasi yang menyediakan akses jaringan internet gratis; Dinas Lingkungan Hidup yang menata lingkungan keluarga, meningkatkan akses air minum, serta sanitasi dasar untuk kesehatan masyarakat; dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyediakan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau. Keberadaan banyak perangkat daerah menegaskan implementasi prinsip inter-organizational relationships. Di mana koordinasi lintas sektor dilakukan bukan secara hierarkis, tetapi melalui mekanisme kerja jaringan dan kolaborasi.

4. Pemerintah Kalurahan dan Pokja Kampung KB sebagai Pelaksana Lapangan

Pasal 4 dan 5 Perbup menegaskan bahwa pengelolaan Kampung KB dilakukan oleh Pokja Kampung KB Kalurahan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan delapan skesi fungsional sesuai fungsi keluarga (agama, pendidikan, reproduksi, ekonomi, perlindungan, kasih sayang, sosial budaya, dan lingkungan). Pokja Kampung KB digandeng oleh Dinas P3AP2KB sebagai unit terkecil dalam masyarakat agar dapat berhadapan langsung dengan masyarakat penerima manfaat. Keberadaan struktur ini memperlihatkan bahwa koordinasi

dilakukan hingga level mikro pemerintahan, memperkuat prinsip plurality of actors yang melibatkan aktor dari tingkat kabupaten hingga rumah tangga.

5. Lembaga dan Mitra Non-Pemerintah

Selain organisasi pemerintah daerah (OPD), lembaga mitra seperti Kementerian Agama, Baznas, serta lembaga masyarakat dan swasta lainnya turut berperan dalam penyelenggaraan Kampung KB. Keterlibatan aktor-aktor ini membentuk kolaborasi multisektor yang sejalan dengan prinsip co-production dalam NPG (Osborne & Stokosch, 2022). Kementerian Agama berperan dalam mengubah perilaku masyarakat melalui bimbingan calon pengantin dan peningkatan kualitas penyuluhan agama serta pelayanan bimbingan keluarga. Baznas mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dengan memberikan bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, dunia usaha dan organisasi masyarakat turut berkontribusi dalam promosi, pendanaan, serta publikasi program, memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program Kampung KB.

6. Masyarakat dan Kader sebagai Co-Producer

Kader KB, PKK, kelompok BKR/BKL/BKB, serta masyarakat umum menjadi pelaksana langsung kegiatan. Mereka berpartisipasi aktif dalam pendataan, pelatihan, hingga pemantauan program di lapangan. Peran ini mengubah posisi masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek sekaligus mitra pemerintah dalam menciptakan nilai publik.

KESIMPULAN

Inovasi GASPOL di Kampung KB Kabupaten Sleman menggambarkan praktik tata kelola publik berdasarkan paradigma New Public Governance (NPG), yang membangun jaringan kerja sama antara pemerintah daerah, instansi teknis, lembaga masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara aktor-aktor yang berperan untuk mencapai tujuan bersama, menggantikan birokrasi hierarkis dengan tata kelola kolaboratif. Dinas P3AP2KB memegang peran penting dalam koordinasi antar aktor, dengan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai fasilitator. Kolaborasi ini membuktikan keberhasilan prinsip pluralitas aktor dan hubungan antarorganisasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Namun, inovasi ini juga menghadapi tantangan, seperti ketidakseimbangan peran dan kontribusi antar aktor, serta potensi tumpang tindih program. Untuk meningkatkan keberhasilan GASPOL, disarankan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor berbasis digital, mengembangkan evaluasi kolaboratif, dan menerapkan model pembelajaran antar daerah. Dengan mekanisme knowledge sharing, inovasi ini dapat diimplementasikan secara luas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2025). Profil Wedomartani. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1190/wedomartani>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

- Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman. (2024, July 18). SOP Pelaksanaan Gaspol di Kampung KB. <https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/sop-pelaksanaan-gaspol-di-kampung-kb/>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.
- Endah, K., & Kholiq, W. A. (2019). Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kbp3a) Dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sejahtera (Studi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 101–112.
- Hendra, O., Prasojo, E., Fathurrahman, R., & Handayani, S. W. (2024). Vertical-horizontal actor collaboration in governance network: A systematic review. *Public Organization Review*, 24(3), 1233–1252. <https://doi.org/10.1007/s11115-024-00794-w>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (2022).
- Keputusan Lurah Tamanmartani Nomor 4.a/Kep/Lur/2024 tentang Pembentukan Keluarga Berkualitas di Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman. (2024). https://tamanmartani.id/dokumen_web/unduh_berkas/645
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). Governance networks in the public sector. Routledge.
- Loeffler, E., & Bovaird, T. (2016). User and community co-production of public services: What does the evidence tell us? *International Journal of Public Administration*, 39(13), 1006–1019. <https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1177143>
- Nabatchi, T., Sancino, A., & Sicilia, M. (2017). Varieties of participation in public services: The who, when, and what of coproduction. *Public Administration Review*, 77(5), 766–776. <https://doi.org/10.1111/puar.12765>
- Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.). Pearson.
- Osborne, S. P. (2010). The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. Routledge.
- Osborne, S. P., & Stokosch, K. (2022). Participation: Add-on or core component of public service delivery? *Australian Journal of Public Administration*, 81(1), 181–200. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12536>
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 40.1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (2022).
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). Radical and disruptive answers to downstream policy problems? A policy design perspective on collaboration. *Public Management Review*, 23(11), 1590–1611. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1879914>
- Torfing, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2019). Transforming the public sector into an arena for co-creation: Barriers, drivers, benefits, and ways forward. *Administration & Society*, 51(5), 795–825. <https://doi.org/10.1177/0095399716680057>
- Widya, S. K. (2024). Peran Pemerintah Dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung Kb) Di Kota Lhokseumawe. Universitas Malikussaleh.

Wiharyanti, D. (2023). Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Perangkat Daerah, Organisasi dan Lembaga (GASPOL) di Kampung KB (No. 470/481). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.